



LAPORAN KINERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2019



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	2
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran	29
Bab IV Penutup	34

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RSUD Bengkalis melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja RSUD Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja RSUD Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2019
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Tk. I
NIP. 19740220 200312 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD Bengkulu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu, RSUD Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 di atas, RSUD Bengkulu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
- b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Perjanjian Kinerja RSUD Bengkulu terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 RSUD Bengkulu telah dilaksanakan, yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Cost Recovery*, hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain pelayanan

yang belum maksimal, anggaran yang tersedia dari APBD masih kurang, persoalan kedisilipinan, dan masih rendahnya kunjungan pasien.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di RSUD Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran manajemen RSUD Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, RSUD Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah RSUD Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi RSUD Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSUD Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



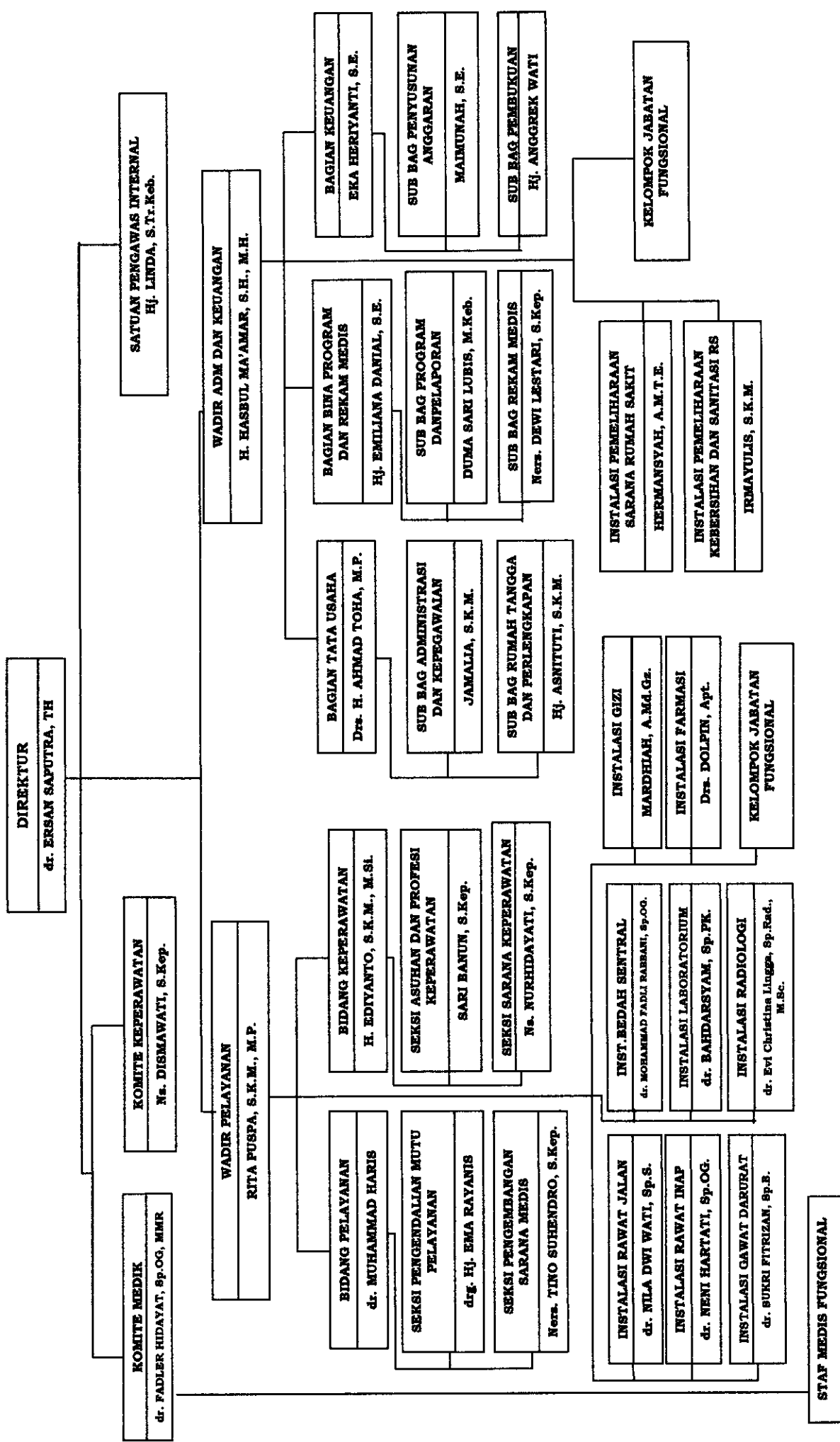
C. Tugas dan Fungsi

- a. RSUD Bengkulu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
 2. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik;
 3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

RSUD Bengkulu dipimpin oleh seorang Plt. Direktur sebagai pejabat eselon II yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Plt. Direktur didukung oleh berbagai unsur yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi RSUD Bengkulu adalah sebagaimana tercantum pada diagram berikut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu.



Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Bengkalis Tahun 2019



Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis,

Tugas dan fungsi serta uraian tugas masing-masing unsur dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut.

1. Direktur

Tugas pokok:

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya, Direktur memiliki fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan;
- Penyusunan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
- Pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Pembinaan pengelolaan ketatausahaan;
- Pembinaan pengelolaan keuangan;
- Evaluasi pelaksanaan program kesehatan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Pelayanan bertugas membantu Direktur Rumah Sakit untuk menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di RSUD Kabupaten Bengkalis, mengadakan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan komite medis dan Ketua SMF dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelayanan medis untuk mencapai kualitas yang tinggi sesuai dengan tugas Rumah Sakit sebagai pusat rujukan Rumah Sakit kelas B di Kabupaten Bengkalis.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis bagi pasien rawat



jalan, pasien gawat darurat, pasien rawat inap, pembedahan pasien dan pasien perawatan intensif.

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan SMF dalam rangka meningkatkan pelayanan medis, pelayanan perawat, pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan medis di lingkungan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis dan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk menunjang pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di Rumah Sakit dengan mempertimbangkan tersedianya alokasi anggaran.
- Menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan dokumen medis di lingkungan Rumah Sakit.

Wakil Direktur Pelayanan membawahi 2 bidang, yaitu:

a. Bidang Pelayanan

Tugas Pokok:

Membantu Wadir Pelayanan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengawasi serta mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta mengawasi dan mengendalikan program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan Rumah Sakit.



- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap mutu pelayanan RSUD Kabupaten Bengkulu.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengembangan pelayanan medis RSUD Kabupaten Bengkulu.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan administrasi bidang pelayanan RSUD Kabupaten Bengkulu.

Bidang Pelayanan membawahi 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan

Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, mengawasi dan mengendalikan program pembinaan pelayanan medik serta mengadakan pembinaan teknik kegiatan pelayanan medik.

2) Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik

Seksi Pengembangan Pelayanan Sarana Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan, pengawasan dan pengendalian program pengembangan. Menyelenggarakan kegiatan kebutuhan logistik pelayanan medik, serta membantu mengadakan pembinaan teknis kegiatan logistik pelayanan medik.

b. Bidang Keperawatan

Tugas Pokok:

Kepala Bidang Keperawatan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi, mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan sarana keperawatan serta memberikan pertimbangan teknis administrasi keperawatan kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:



- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta pengendalian kegiatan pelayanan, asuhan keperawatan, sarana keperawatan dan teknis administrasi keperawatan.
- Membantu Wadir Pelayanan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan terhadap pasien.

Bidang Keperawatan membawahi 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan

Seksi Asuhan dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan peningkatan pendidikan, pelatihan perawatan dan etika mutu keperawatan.

2) Seksi Sarana Keperawatan

Seksi Sarana Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana keperawatan.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Tugas Pokok:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan



kegiatan fungsi pelayanan kesekretariatan, bina program dan rekam medik, keuangan, akuntansi dan verifikasi Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bina program yang meliputi perencanaan, pelaporan, hukum dan informasi serta rekam medik.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan akuntansi keuangan dan manajemen serta verifikasi.

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahi 3 bagian, yaitu:

a. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi kegiatan pelayanan administrasi organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis serta memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan Rumah Sakit(Direksi) dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Fungsi:

- Menyelenggarakan administrasi umum ketatausahaan
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan serta ketatalaksanaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kerumahtanggaan dan keamanan, kebersihan di lingkungan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Membantu Wadir Umum dan Keuangan untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program kebutuhan Rumah Sakit.



Bagian Tata Usaha membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.

2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana non medik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan transportasi.

b. Bagian Bina Program dan Rekam Medik

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Bina Program dan Rekam Medik adalah salah seorang Staf Wadir Administrasi dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Direktur menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Bina Program dan Rekam Medik.

Fungsi:

- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan perencanaan/penyusunan program dan laporan RSUD Kabupaten Bengkalis.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengumpulan laporan, kegiatan penyimpanan dan pelayanan satu dokumentasi medis.

Bagian Bina Program dan Rekam Medik membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:



1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data, penyusunan program dan laporan.

2) Sub Bagian Rekam Medik

Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan rekam medik dan penyimpanan dokumen medik.

c. Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Kepala Bagian Keuangan bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi kegiatan penyusunan anggaran, mobilisasi dana serta perbendaharaan Rumah Sakit.

Fungsi:

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit setiap tahun anggaran.
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Rumah Sakit.
- Menyelenggarakan sistem pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Bagian Keuangan membawahi 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran

Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, monitoring pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran.



2) Sub Bagian Pembukuan

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pembukuan serta memeriksa dan meneliti laporan keuangan.

4. Komite Medik

- a. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
- b. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- c. Komite Medik membantu Direktur menyusun standar pelayanan, menangani masalah etis medis, meningkatkan mutu tenaga medis, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- e. Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- f. Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- g. Pembentukan Komite Medik pada RSUD ditetapkan oleh Direktur.

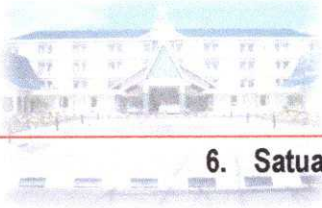
5. Staf Medis Fungsional

Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja dalam jabatan fungsional.

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas:

- a. Mengatur kegiatan profesi.
- b. Mengkoordinir pengembangan staf medis.
- c. Menjaga kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan kepeminatan dan keahliannya.



6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal Rumah Sakit.

7. Instalasi-instalasi

- a. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional.
- b. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- e. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Instalasi RSUD Bengkalis terdiri dari:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan
 - 2) Instalasi Rawat Inap
 - 3) Instalasi Gawat Darurat
 - 4) Instalasi Bedah Sentral
 - 5) Instalasi Laboratorium
 - Laboratorium Patologi Klinik
 - Laboratorium Patologi Anatomi
 - 6) Instalasi Radiologi
 - 7) Instalasi Gizi
 - 8) Instalasi Farmasi
 - 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - 10) Instalasi Pemeliharaan Kebersihan dan Sanitasi Rumah Sakit.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja RSUD Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bengkalis Tahun 2016-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5	80	81	82	83	84
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50%	60%	70%	80%	90%	90%
Meningkatkan kualitas pengelolaan RS	Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	65%	75%	85%	90%	95%	100%
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit	<i>Cost Recovery Rate</i>	42%	45%	47%	50%	52%	55%

**B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%
Meningkatkan kualitas pengelolaan RS	Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
	Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	90%
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	80%
Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	80%
Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit	<i>Cost Recovery Rate</i>	50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja RSUD Bengkalis tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Bengkalis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2019, yaitu:

1. Terselenggaranya Pelayanan Prima; dan
2. Meningkatnya Utilitas Marginal

Dari tujuan-tujuan tersebut, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja RSUD Bengkalis untuk tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
RSUD BENGKALIS TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI		TAHUN (n)			REALISASI s.d. TAHUN (n)	TARGET AKHIR (2021) RENSTRA
				(n-2)	(n-1)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	- %	88,33 73	81,25 75,25	82 80	69,63 80	84,91 100	69,63 80	84 90
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan RS	Peringkat Akreditasi Rumah Sakit Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	- %	Paripurna 34	Paripurna 58	Paripurna 90	Paripurna 93,61	100 100	Paripurna 81	Paripurna 100
3	Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	%	100	100	80	98,81	100	98,81	100
4	Meningkatnya Kemampuan dalam Membayai Biaya Operasional Rumah Sakit	Cost Recovery Rate	%	24,75	47,72	50	29,81	59,62	29,81	55

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa indikator kinerja pada tahun 2019 belum seluruhnya mencapai target, ada 5 (lima) indikator yang sudah mencapai target yaitu persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM), peringkat akreditasi rumah sakit, persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi, persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar dan Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi. Penjelasan atas pencapaian indikator ini akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Penjelasan atas tabel di atas diuraikan di bawah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RSUD Bengkalis.

Tujuan 1

Terselenggaranya Pelayanan Prima

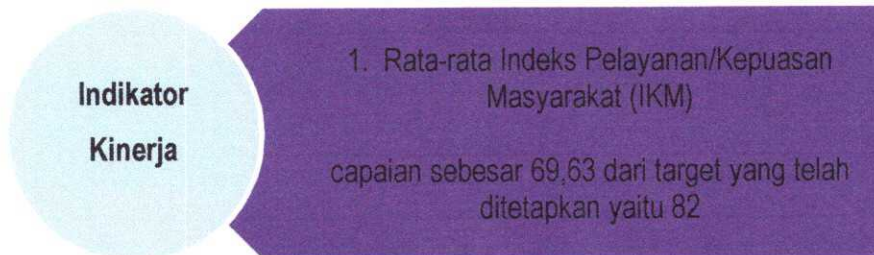
Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bengkalis sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan pertama keberhasilan dari upaya pencapaian visi dan misi RSUD Bengkalis tidak terlepas dari keterlibatan semua sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu sumber daya manusia yang kompeten dan profesional wajib dimiliki oleh RSUD Bengkalis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bengkalis sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan pertama yang harus dicapai adalah terselenggaranya pelayanan prima yang berarti pelayanan tersebut diberikan telah memenuhi standar kualitas yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Agar berkualitas tentu saja pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan sesuai standar prosedur operasional. Dari tujuan ini, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:

Sasaran Strategis
1

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran strategis pertama dari tujuan pertama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan pada Tahun 2019. Indikator dan cara penilaian yang dilakukan menggunakan format kuesioner terdiri dari 8 (delapan) unsur yang telah ditetapkan oleh manajemen RSUD Bengkalis dan penilaian mengikuti cara perhitungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berikut ini adalah hasil survey yang telah dilaksanakan tersebut.

Tabel 3.2.
Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Bengkalis Tahun 2019

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNSUR (NRR)	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR (NRR x 0,125)
1	Dokter	3,76	0,47
2	Perawat/Bidan	3,04	0,38
3	Obat	2,98	0,37
4	Fasilitas/Sarana	2,82	0,35
5	Keamanan	2,46	0,31
6	Kebersihan	2,12	0,27
7	Administrasi	2,10	0,26
8	Pembayaran/Kasir	3,00	0,38
Jumlah			2,79
IKM			2,79 x 25 = 69,63

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi, yaitu jumlah nilai rata-rata unsur tertimbang dikalikan 25, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 69,63.
2. Mutu pelayanan B.
3. Kinerja unit pelayanan "Baik".

Berikut ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.3.
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Bengkalis Tahun 2018 dan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah indikator yang digunakan	8 indikator	8 indikator
Hasil penilaian	81,25	69,63
Kesimpulan	Baik	Sangat Baik

Dapat dinilai bahwa terjadi penurunan Indeks pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bengkalis. Walaupun nilai IKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun pengukuran nilai IKM secara keseluruhan masih dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diukur berdasarkan unsur yang telah ditentukan. Dari 8 unsur hanya 3 unsur saja yang kategorinya kurang baik. Telah dilakukan analisis terhadap hasil survey dan diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- a. Petugas menepati jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan.
- b. Terus meningkatkan kesopanan dan keramahan petugas, meskipun sudah baik, tetapi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
- c. Meningkatkan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan dengan pemberian *reward* yang tepat waktu serta *punishment* yang jelas dan tegas.
- d. Tersedianya tenaga admisi yang dapat membantu dan mengarahkan pasien yang berobat serta membantu mengarahkan para penjenguk pasien untuk berkunjung sesuai jadwal besuk dan berpatroli ke setiap lantai gedung Rumah Sakit.
- e. Melengkapi ruang tunggu poliklinik dengan televisi yang menyiarkan berbagai informasi kesehatan, sehingga hal ini akan memberikan kesibukan bagi pasien yang menunggu giliran.

**Indikator
Kinerja**

2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

capaian sebesar 80% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Bengkalis kepada masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran kinerja pelayanan di RSUD Bengkalis.

Formulasi perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai dalam SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator di Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Bengkalis pada tahun 2019:

Tabel 3.4.
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Bengkalis Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan	Indikator		%
		Target	Pencapaian	
1	Gawat Darurat	8	7	87,5
2	Rawat jalan	9	7	78
3	Pelayanan Rawat Inap	11	11	100
4	Bedah sentral	7	6	85,7
5	Pelayanan persalinan	8	8	100
6	Pelayanan perinatologi	1	0	0
7	Pelayanan Intensif	8	6	75
8	Radiologi	4	4	100
9	Laboratorium	4	3	75
10	Patologi anatomi	4	3	75

No	Jenis Pelayanan	Indikator		%
		Target	Pencapaian	
11	Rehabilitasi Medik	3	3	100
12	Farmasi	5	5	100
13	Gizi	3	3	100
14	Unit Transfusi Darah	2	0	0
15	Rekam Medik	4	1	25
16	Pelayanan Pasien Miskin	1	1	100
17	Pengolahan limbah	5	3	60
18	Administrasi manajemen	9	6	67
19	Pelayanan ambulance/	2	2	100
20	Pemulasaran jenazah kereta jenazah	1	1	100
21	Pelayanan Laundry	2	2	100
22	Pemeliharaan Sarana rumah sakit	2	2	100
23	Pencegahan & Pengendalian Infeksi	7	4	57,1
24	Pelayanan keamanan	3	2	67
Jumlah		113	90	80

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2019 sudah mencapai target yaitu 80%. Nilai SPM menggambarkan kualitas pelayanan di RSUD Bengkalis. Apakah kinerja pelayanan di RSUD Bengkalis masih harus ditingkatkan atau perlu dikaji kembali ketepatan penetapan nilai target semua indikator dan apakah setiap indikator telah di survei dengan benar. Pada awal tahun 2017 telah dibentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Bengkalis, salah satu fungsi dibentuknya komite ini adalah untuk mengawasi kinerja pelayanan menggunakan target indikator SPM. Keberadaan Komite PMKP di Rumah Sakit sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit terhadap pasien, sehingga setiap pelayanan yang diberikan memenuhi mutu dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Tujuan 2

Meningkatnya Utilitas Marginal

Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Bengkalis sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan kedua yang harus dicapai adalah meningkatnya utilitas marginal yang berarti kemampuan RSUD Bengkalis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk memberikan kepuasan pada masyarakat dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, tidak hanya berupa upaya kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga preventif dan promotif. Selanjutnya, pelayanan kesehatan juga harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari tujuan ini terdapat 3 sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu:

Sasaran Strategis 2

- Meningkatkan kualitas pengelolaan RS

Untuk mencapai sasaran strategis ke-2 (dua) tujuan ke-2 (dua), terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

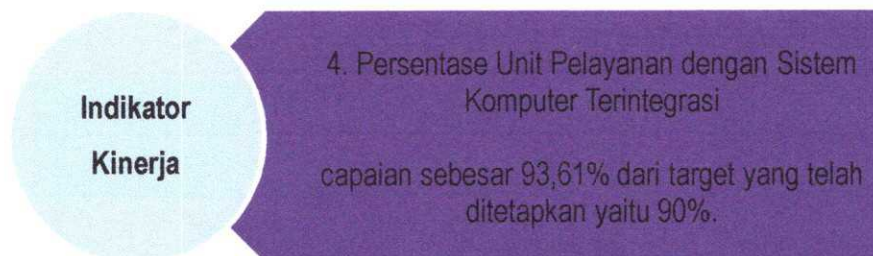
Indikator Kinerja

3. Peringkat Akreditasi Rumah Sakit
capaian **Paripurna** dari target yang telah ditetapkan yaitu **Paripurna**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Indikator ini dinilai dari pencapaian akreditasi Rumah Sakit. Tahun 2017 RSUD Bengkalis telah memperoleh pencapaian akreditasi tingkat Paripurna, hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pada survei akreditasi versi 2012 ini, pemenuhan standar tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi dari standar akreditasi yang dinilai dengan menggunakan metodologi telusur. Dengan melakukan wawancara, observasi pelayanan dan membaca regulasi yang sudah dibuat oleh Rumah Sakit dan dokumen implementasinya maka survei akan membuat skoring 0, 5 atau 10 berdasarkan kepatuhan Rumah Sakit dalam melaksanakan standar.

Setelah memperoleh akreditasi paripurna untuk penilaian akreditasi versi 2012 diharapkan kinerja staf tidak kembali ke budaya lama. Salah satu solusinya yaitu manajemen menyusun standar prosedur operasional (SPO), program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup RSUD Bengkalis, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.



Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi adalah persentase ketersediaan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari Antrian, Pendaftaran Online, Pendaftaran Rawat Jalan, Pendaftaran IGD, Pendaftaran Rawat Inap, Farmasi, Medical Check Up (MCU), Billing/IJP, Rekam Medik, Assembling, Radiologi, Fisioterapi, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Kasir, Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) sampai ke Instalasi Gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan memiliki suatu sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Indikator ini dinilai berdasarkan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Bengkalis}} \times 100\%$$

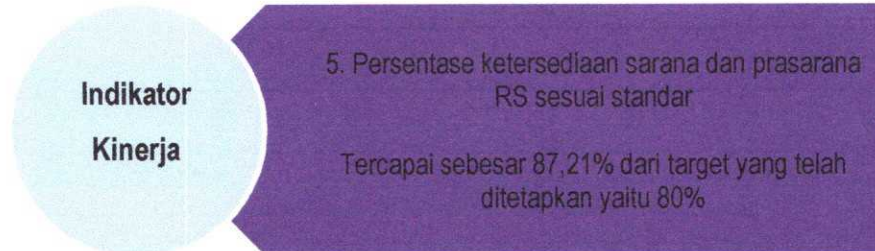
Berikut ini adalah Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi di RSUD Bengkalis pada tahun 2019:

Tabel 3.5.
Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi
RSUD Bengkalis Tahun 2019

No	INSTALASI/RUANG/UNIT	KETERSEDIAAN SIMRS		%
		ADA	TIDAK	
1	Antrian	√	-	100%
2	Pendaftaran Online	√	-	100%
3	Pendaftaran Rawat Jalan	√	-	100%
4	Pendaftaran IGD	√	-	100%
5	Pendaftaran Rawat Inap	√	-	100%
6	Farmasi	√	-	85%
7	Medical Check Up (MCU)	√	-	100%
8	Billing/IJP	√	-	100%
9	Rekam Medik	√	-	100%
10	Assembling	√	-	100%
11	Radiologi	√	-	100%
12	Fisioterapi	√	-	100%
13	Hemodialisa	√	-	100%
14	Laboratorium Patologi Klinik	√	-	100%
15	Laboratorium Patologi Anatomi	√	-	100%
16	Kasir	√	-	0%
17	Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS)	√	-	100%
18	Instalasi Gizi	√	-	100%
Total Persentase				93,61%

Sejak tahun 2014 SIM RS sudah mulai terintegrasi dengan instalasi/ruang/unit pelayanan yang ada di RSUD Bengkalis. SIM RS yang terkomputerisasi dengan menggunakan *software* dari pihak ketiga akhirnya dapat dilaksanakan, meskipun

penerapannya belum meliputi seluruh kegiatan di RSUD Bengkalis. Hal ini disebabkan belum mencukupinya sarana komputer dan *server* di seluruh ruangan Rumah Sakit. Untuk itu pada tahun 2020 direncanakan kekurangan sarana prasarana tersebut akan dipenuhi dan untuk informasi yang belum terkomputerisasi, tetap dilakukan secara manual.



Pengertian dari indikator di atas adalah ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, lampiran tentang peralatan, sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B. Formulasi perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana RS Kelas B}} \times 100\%$$

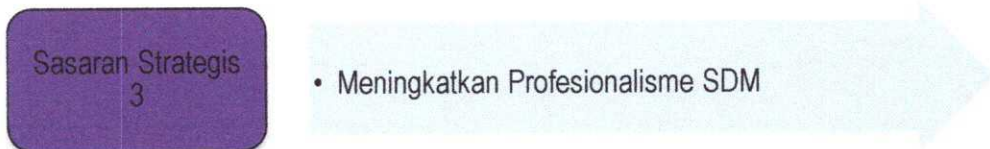
Berdasarkan data yang tersedia di bidang pelayanan, Keperawatan dan Tata Usaha, pada tahun 2019 ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana Rumah Sakit sebesar 87,21%. Nilai ini sudah melebihi target persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B untuk tahun 2019. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan instrumen *self assessment* berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dari hasil analisa tersebut akan diketahui kekurangan sarana dan prasarana di RSUD Bengkalis, dan untuk memenuhinya disampaikan usulan melalui APBD Kabupaten Bengkalis, selain itu melalui dana Bantuan Keuangan (BANKEU) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Kondisi sarana dan prasarana RSUD Bengkalis pada tahun 2019 dan targetnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar
 RSUD Bengkalis Tahun 2019

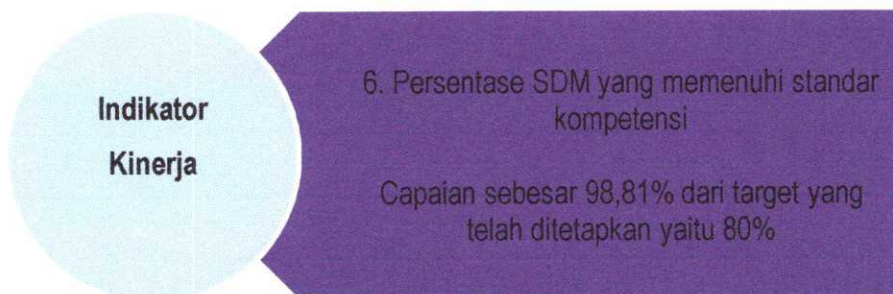
NO	PERSYARATAN	KELAS B	KEADAAN RS SAAT INI	%
I.	Peralatan	1048	853	81,39
A.	Pelayanan Gawat Darurat	47	47	100
B.	Pelayanan Penyakit Dalam	47	47	100
C.	Pelayanan Bedah	88	83	94,30
D.	Pelayanan Kesehatan Anak	65	65	100
E.	Pelayanan Obstetri Dan Ginekologi	280	266	95
F.	Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif	131	118	90,10
G.	Pelayanan Mikrobiologi	37	16	43,20
H.	Pelayanan Patologi Anatomi	72	40	55,60
I.	Pelayanan Patologi Klinik	51	34	66,70
J.	Pelayanan Radiologi	22	17	77,30
K.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	64	28	43,80
L.	Pemulasaran Jenazah	14	12	85,70
M.	Instalasi Gizi	130	80	61,50
II.	Sarana Dan Prasarana	43	40	93,10
Total Persentase				87,21

Meskipun nilai persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas B sudah melebihi target, akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu belum adanya bangunan gedung kantor manajemen Rumah Sakit. Hal ini perlu mendapat perhatian karena selama ini kantor manajemen Rumah Sakit masih memanfaatkan ruangan-ruangan yang pada awalnya disediakan sebagai ruang perawatan di Lantai 4. Artinya ruangan yang seharusnya dapat menampung pasien lebih banyak menjadi berkurang. Namun untuk mewujudkan adanya gedung kantor Rumah Sakit memerlukan alokasi dana yang cukup besar dan pengadaan gedung kantor telah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dan akan segera

rampung bila rencana kegiatan pengadaan gedung kantor pada tahun 2020 dapat terealisasi.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-3 dari tujuan kedua, terdapat 1 indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya selama tahun 2019. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

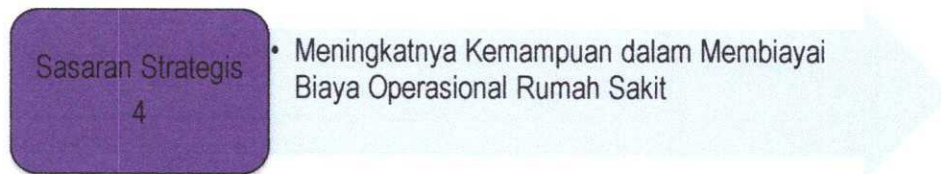
Tabel 3.7.
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
RSUD Bengkalis Tahun 2019

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	Jumlah SIK/ SIP yang berlaku	%
1	Medis	53	53	100
2	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	252	252	100
3	Tenaga Kesehatan Lain	115	110	95,65
Jumlah		420	415	98,81

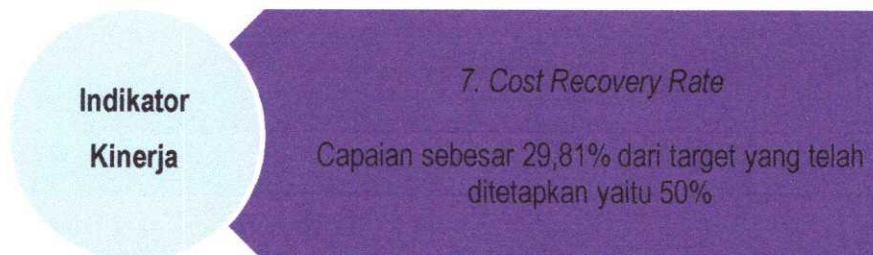
Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki SIK/SIP}}{\text{Jumlah total tenaga fungsional tertentu di unit kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2019 telah mencapai target yaitu 98,81%. Masih terdapat beberapa orang tenaga kesehatan lain yang SIK-nya masih dalam proses pengurusan.



Untuk mencapai sasaran strategis ke-4 (empat), terdapat 1 indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Bengkalis. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Cost Recovery Rate (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Pengertian lainnya adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*Revenue*). Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan asuransi. Formulasi perhitungan *CRR* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Revenue (TR)/Realisasi Pendapatan Rumah Sakit}}{\text{Total Cost (TC)/Realisasi Belanja Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Penyebab belum tercapainya target *CRR* antara lain jika dilihat dari aspek pendapatan adalah rendahnya tarif dan belum maksimalnya jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Jika dilihat dari aspek biaya adalah besarnya biaya operasional di RSUD Bengkalis. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran di setiap ruangan/pusat biaya perlu dilakukan sehingga dapat diketahui efisiensi setiap pusat biaya, sedangkan untuk memaksimalkan pendapatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi marketing rumah sakit seperti penyebaran brosur, membuka jenis pelayanan baru yang lebih inovatif dan unik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategisnya, pada tahun 2019 RSUD Bengkalis mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dengan jumlah total Rp 162.203.512.425,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 137.972.952.081,00 atau 85,06% yang terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta biaya pemungutan retribusi daerah Rp. 36.780.409.599,00 telah direalisasikan selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp 32.766.159.714,00 atau mencapai 89,09%.
2. Belanja langsung yang dianggarkan dalam 11 program dan 34 kegiatan sebesar Rp. 125.423.102.826,00 telah direalisasikan selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 105.206.792.367,00 atau mencapai 83,88%.

Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung RSUD Bengkalis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Bengkalis Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.780.409.599,00	32.766.159.714,00	89,09%	100,00%
BELANJA LANGSUNG	125.423.102.826,00	105.206.792.367,00	83,88%	99,60%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.319.379.225,00	8.844.379.092,00	94,90%	100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.341.450.000,00	1.308.799.000,00	97,57%	100,00%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.002.385.000,00	3.701.562.320,00	92,48%	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42.000.000,00	32.984.620,00	78,53%	100,00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.895.255.000,00	1.790.731.750,00	94,49%	100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	212.489.225,00	211.679.825,00	99,62%	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	349.960.800,00	99,99%	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00%	100,00%
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	429.000.000,00	421.050.777,00	98,15%	100,00%
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	854.200.000,00	837.465.000,00	98,04%	100,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	90.000.000,00	87.545.000,00	97,27%	100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.563.631.380,00	3.831.877.532,00	50,66%	100,00%
Pembangunan Gedung Kantor	6.000.000.000,00	2.440.391.000,00	40,67%	100,00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14.800.000,00	-	0,00%	100,00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	909.925.380,00	781.875.000,00	85,93%	100,00%
Pengadaan Mebeleur	395.706.000,00	385.586.000,00	97,44%	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	243.200.000,00	224.025.532,00	92,12%	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	520.000.000,00	515.007.292,00	99,04%	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	520.000.000,00	515.007.292,00	99,04%	100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.060.000,00	45.685.787,00	97,08%	100,00%
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat	47.060.000,00	45.685.787,00	97,08%	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
Daerah				
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.508.460.000,00	7.333.328.177,00	97,67%	100,00%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.008.460.000,00	4.855.021.897,00	96,94%	100,00%
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (BPJS)	2.500.000.000,00	2.478.306.280,00	99,13%	100,00%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14.318.800.000,00	11.355.655.000,00	79,31%	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	14.318.800.000,00	11.355.655.000,00	79,31%	100,00%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	121.851.400,00	121.355.400,00	99,59%	100,00%
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	47.500.000,00	47.044.000,00	99,04%	100,00%
Promosi Kesehatan Melalui Peringatan Hari Kesehatan Nasional	74.351.400,00	74.311.400,00	99,95%	100,00%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	504.179.800,00	418.199.718,00	82,98%	100,00%
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	118.879.800,00	79.074.800,00	66,52%	100,00%
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	385.300.000,00	339.124.918,00	88,06%	100,00%
Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	28.632.541.021,00	25.862.202.768,00	90,32%	95,57%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	9.505.860.000,00	9.145.832.560,00	96,21%	100,00%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	807.460.000,00	786.291.000,00	97,38%	100,00%
Pengadaan Gas Oxygen dan N20 dan Pemadam Kebakaran	61.812.500,00	55.245.000,00	89,38%	100,00%
Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih	679.444.500,00	551.051.136,00	81,10%	100,00%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK FISIK)	7.819.937.226,00	6.179.438.232,00	79,02%	73,40%
Pengadaan Alat Penunjang Non Medis Rumah Sakit (DAK FISIK)	9.758.026.795,00	9.144.344.840,00	93,71%	100,00%

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
		KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	4.127.200.000,00	3.450.876.020,00	83,61%	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala RS	2.044.200.000,00	1.850.965.000,00	90,55%	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan RS	950.000.000,00	607.023.020,00	63,90%	100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	1.133.000.000,00	992.888.000,00	87,63%	100,00%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	52.760.000.000,00	43.428.225.581,00	82,31%	100,00%
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	52.760.000.000,00	43.428.225.581,00	82,31%	100,00%
TOTAL	162.203.512.425,00	137.972.952.081,00	85,06%	99,80%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara fisik, hampir semua kegiatan dapat dicapai 100%, yang artinya walaupun realisasi keuangan tidak 100% tapi target kegiatan dapat dicapai dengan baik dan dengan demikian telah dilakukan efisiensi anggaran.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, pada tahun 2019 RSUD Bengkalis juga menerima dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 17,577,964,021,00 yang dialokasikan untuk belanja modal alat-alat kesehatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15,323,783,072,00 atau setara dengan 87,18% dan Realiasi Fisik sebesar 81%.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran RSUD Bengkalis per jenis belanja dari tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.9.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
RSUD Bengkalis Tahun 2018 dan 2019

Jenis Belanja	Anggaran RSUD Bengkalis Tahun 2018 dan 2019			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
Tahun 2019				
Belanja Pegawai	36.780.409.599	32.766.159.714	4.014.249.885	89,09
Belanja	84.885.963.425	71.444.566.335	13.441.397.090	84,17

Jenis Belanja	Anggaran RSUD Bengkalis Tahun 2018 dan 2019			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
Barang dan Jasa				
Belanja Modal	40.537.139.401	33.762.226.032	6.774.913.369	83,29
Jumlah	162.203.512.425	137.972.952.081	24.230.560.344	85,06
Tahun 2018				
Belanja Pegawai	31.115.301.980	28.796.903.242	2.318.398.738	92,55
Belanja Barang dan Jasa	80.882.938.214	74.117.299.377	6.765.638.863	91,64
Belanja Modal	26.453.127.187	23.738.175.607	2.714.951.580	89,74
	138.451.367.381	126.652.378.226	11.798.989.181	91,48
Jumlah	31.115.301.980	28.796.903.242	2.318.398.738	92,55

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan persentase realisasi penyerapan anggaran RSUD Bengkalis menunjukkan tren menurun dengan gap antara pagu dan realisasi anggaran yang cenderung relatif menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diduga sebelumnya, antara lain ada kegiatan yang gagal lelang, kemudian beberapa alat kesehatan tidak tayang di e-katalog dan sebagainya.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain rencana kinerja tahunan akan disusun secara lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra RSUD Bengkalis dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit di lingkungan RSUD Bengkalis.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja RSUD Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 RSUD Bengkalis telah dilaksanakan, yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Cost Recovery*, hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain pelayanan yang belum maksimal, anggaran yang tersedia dari APBD masih kurang, persoalan kedisilipinan, dan masih rendahnya kunjungan pasien.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di RSUD Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf RSUD Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2020, RSUD Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas program kerja Sub Bagian, Seksi dan Instalasi untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kekuatan dan peluang sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengirimkan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dari berbagai instansi berwenang.
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi baik horizontal maupun vertikal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat melalui Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan penyebaran informasi.

RSUD Bengkalis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis RSUD Bengkalis di tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Bengkalis Tahun 2019 ini disusun agar dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bengkalis, Februari 2020
Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Tk.I
NIP. 197402202003121007